

**ANALISIS SEKURITISASI DAN KEAMANAN NASIONAL: KASUS  
TIKTOK DI AMERIKA SERIKAT**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**SITI NURKHOLIZA**

**NPM 2216071112**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**

## ABSTRAK

### ANALISIS SEKURITISASI DAN KEAMANAN NASIONAL: KASUS TIKTOK DI AMERIKA SERIKAT

Oleh

SITI NURKHOLIZA

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan dinamika baru dalam hubungan antara negara dan perusahaan teknologi global. Sejak 2019, TikTok dipandang oleh Pemerintah Amerika Serikat sebagai platform yang berpotensi mengancam keamanan nasional, terutama terkait keamanan data pengguna dan kemungkinan pengaruh pemerintah Tiongkok terhadap perusahaan induknya, ByteDance. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses sekuritisasi TikTok oleh Pemerintah Amerika Serikat serta menjelaskan dinamika hubungan keduanya pada periode 2019–2026.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari dokumen resmi pemerintah Amerika Serikat, dokumen perusahaan, jurnal ilmiah, laporan lembaga riset, serta media internasional. Analisis dilakukan menggunakan teori sekuritisasi dari Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde dengan menelaah unsur *securitizing actor*, *speech act*, *referent object*, *audience acceptance*, dan *extraordinary measures*, serta konsep keamanan nasional yang mencakup elemen kedaulatan, kepentingan nasional, ancaman, dan lingkungan keamanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat mengonstruksikan TikTok sebagai ancaman keamanan nasional melalui proses sekuritisasi. Dinamika hubungan antara Pemerintah Amerika Serikat dan TikTok menunjukkan tiga pola utama, pertama, fase pemaksaan divestasi pada masa pemerintahan Trump periode pertama, kedua pola negosiasi pada masa pemerintahan Biden dan ketiga, pola solutif pada masa pemerintahan Trump periode kedua yang berujung pada pembentukan TikTok USDS Joint Venture LLC sebagai mekanisme restrukturisasi kepemilikan. Tindakan-tindakan yang diambil pemerintah Amerika Serikat terhadap TikTok mencerminkan upaya perlindungan terhadap keamanan nasional Amerika Serikat.

**Kata Kunci:** TikTok, Amerika Serikat, keamanan nasional, sekuritisasi, ByteDance

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF SECURITIZATION AND NATIONAL SECURITY: THE CASE OF TIKTOK IN THE UNITED STATES**

**By**

**SITI NURKHOLIZA**

The development of digital technology has created new dynamics in the relationship between states and global technology companies. Since 2019, TikTok has been viewed by the United States government as a platform that potentially threatens national security, particularly regarding user data security and the possibility of influence by the Chinese government over its parent company, ByteDance. This study aims to analyze the securitization process of TikTok by the United States Government and to explain the dynamics of the relationship between the United States Government and TikTok during the period 2019–2026. This study employs a qualitative method with a literature review approach. Data were collected from official documents of the United States Government, corporate documents, academic journals, research institution reports, and international media sources. The analysis applies the securitization theory developed by Barry Buzan, Ole Wæver, and Jaap de Wilde by examining the elements of securitizing actor, speech act, referent object, audience acceptance, and extraordinary measures, as well as the national security concept encompassing the elements of sovereignty, national interests, threats, and the security environment. The findings reveal that the United States Government constructed TikTok as a national security threat through a securitization process. The dynamics of the relationship between the United States Government and TikTok demonstrate three main patterns: first, the forced divestiture phase during the first Trump administration; second, the negotiation pattern during the Biden administration; and third, the resolute pattern during the second Trump administration, culminating in the establishment of TikTok USDS Joint Venture LLC as an ownership restructuring mechanism. The measures taken by the United States Government against TikTok reflect efforts to protect the national security of the United States.

**Keywords:** TikTok, United States, national security, securitization, ByteDance

**ANALISIS SEKURITISASI DAN KEAMANAN NASIONAL: KASUS  
TIKTOK DI AMERIKA SERIKAT**

**Oleh**

**Siti Nurkholiza**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

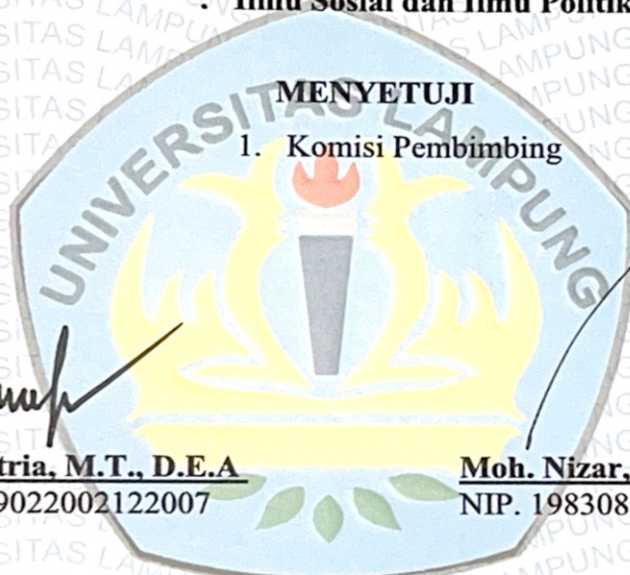
Judul Skripsi : **ANALISIS SEKURITISASI DAN KEAMANAN NASIONAL: KASUS TIKTOK DI AMERIKA SERIKAT**

Nama Mahasiswa : **Siti Nurkholiza**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2216071112**


Jurusan : **Hubungan Internasional**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



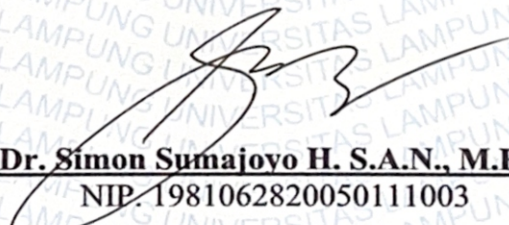
**MENYETUJI**

1. **Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Arie Fitria, M.T., D.E.A.**  
NIP. 197809022002122007

  
**Moh. Nizar, S.IP., M.A.**  
NIP. 198308192015041005

2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional**

  
**Dr. Simon Sumajoyo H. S.A.N., M.P.A.**  
NIP. 1981062820050111003

**MENGESAHKAN**

**I. Tim Penguji**

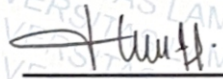
**Ketua : Dr. Arie Fitria, M.T., D.E.A.**



**Sekretaris : Moh. Nizar, S.IP., M.A.**



**Penguji Utama : Tety Rachmawati, S.IP., M.A.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**  
**NIP. 197608212000032001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 08 Juni 2026**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 05 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Siti Nurkholiza  
2216071112

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Siti Nurkholiza lahir di Pandeglang pada 20 Juni 2004. Penulis merupakan putri keempat dari pasangan Bapak Latif dan Ibu Nurul.

Pendidikan formal peneliti diawali di TK AN Nafi 3 dan diselesaikan pada tahun 2010. Selanjutnya, peneliti

menempuh pendidikan dasar di MI Mathlaul Anwar Pusat dan lulus pada tahun 2016. Pendidikan menengah pertama ditempuh di MTs Mathlaul Anwar dan diselesaikan pada tahun 2019. Kemudian, peneliti melanjutkan pendidikan di MA Mathlaul Anwar hingga lulus pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, peneliti diterima sebagai mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjalani masa perkuliahan, peneliti aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan. Peneliti terlibat dalam kepanitiaan IR League dan Funcamp 2023 yang diselenggarakan oleh Program Studi Hubungan Internasional Universitas Lampung. Peneliti juga aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa PIK R RAYA Universitas Lampung serta tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Banten Universitas Lampung. Untuk menambah pengalaman, peneliti mengikuti program magang di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Banten pada Divisi Komersial.

## **MOTTO**

*"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu."*

**(QS. Al-Baqarah: 216)**

*"Ikhtiar, Tawakal, Berdoa, Maka kamu akan berhasil"*

**(Siti Nurkholiza)**

## **PERSEMBAHAN**

Sebagai wujud bakti dan rasa syukur, skripsi ini peneliti persembahkan kepada Mama dan Bapak tercinta. Di balik setiap halaman yang tersusun, terdapat doa-doa yang kalian panjatkan, pengorbanan yang kalian berikan, dan cinta yang tak pernah berkurang. Semoga skripsi ini menjadi bukti bahwa segala perjuangan dan kasih sayang yang kalian curahkan telah mengantarkan penulis sampai pada titik ini.

## SANWACANA

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan ridho-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Sekuritisasi Dan Keamanan Nasional: Kasus Tiktok Di Amerika Serikat” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, motivasi, serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Arie Fitria, M.T., D.E.A., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing peneliti, memberikan saran, kritik, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Moh. Nizar, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang senantiasa memberikan masukan, arahan, serta dukungan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Tety Rachmawati, S.IP., M.A., selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman, bantuan, serta pelayanan selama peneliti menjalani masa perkuliahan;
7. Ibuku tersayang, Ibu Nurul Aeniah, terima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanan yang tak terhingga, setiap doa di setiap sujudmu, dan setiap motivasi yang menjadi bahan bakar bagi peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Setelah banyaknya cobaan dan rintangan yang terjadi, terima kasih untuk tetap bertahan dan selalu berada di samping peneliti sampai saat ini, semoga Allah memberikan umur panjang dan kesehatan untukmu;
8. Bapakku tersayang, terima kasih telah hadir dan memberikan banyak pelajaran hidup, semua jasmu akan selalu diingat. Semoga Allah mengizinkan kita bertemu kembali di surgaNya;
9. Kakak tersayang, A Angga, yang telah berkorban besar dalam hidup peneliti, terima kasih karena telah menjadi sosok pengganti Ayah, menjadi pendengar yang baik, dan menyayangi dengan sepenuh hati. Terima kasih untuk selalu memeluk dan memihak peneliti dalam hal apapun, di kehidupan selanjutnya, tetap jadi Aa yang memilihku sebagai adikmu, ya;
10. A Yubi dan Teteh, yang dalam diam selalu mendoakan, saling menguatkan di tengah kehidupan ini;
11. Ma Ade dan Alm. Pak Ade, yang sejak kecil memberikan kasih sayang dan cintanya pada peneliti, untuk setiap malam hangat yang peneliti butuhkan, terima kasih karena telah menjadi orang tua kedua bagi peneliti, semoga Allah memberikan kesehatan dan umur panjang untuk Ma Ade dan menempatkan Alm. Pak Ade di tempat terbaik;
12. Azri dan Halif, yang menjadi penghibur di saat peneliti jenuh dalam penulisan skripsi;
13. Keluarga besar peneliti yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam setiap proses yang dijalani oleh peneliti;
14. Fatimah Zahra, sahabat peneliti yang tidak pernah lelah mendengar segala keluh, tangis, tawa, dan ribuan cerita. Terima kasih untuk segala waktu,

tenaga, dan kenangan yang diberikan, semoga Allah memudahkan setiap langkah kita dalam hidup ini;

15. Hilma, Firda, Putri, Alya, Amalia, Rafi, dan Andika sahabat peneliti sejak masa MTs yang selalu memberikan semangat, perhatian, doa, serta dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini;
16. Amara dan Khusnul, sahabat peneliti yang senantiasa saling menguatkan selama menjalani kehidupan di kota rantau, terima kasih atas kehadiran, dukungan, dan kebersamaan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih karena selalu ada dalam setiap perjalanan peneliti, baik pada masa-masa penuh semangat maupun saat menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Terima kasih untuk setiap malam yang dihabiskan bersama, untuk setiap percakapan, tawa, doa, serta motivasi yang menjadi sumber kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan perjalanan ini. Semoga persahabatan yang telah terjalin dengan baik dapat terus terjaga dan menjadi kenangan berharga yang akan selalu dikenang;
17. Syafira Raissa Rahman, teman yang selalu mendengarkan keluh kesah peneliti sejak awal perkuliahan, terima kasih untuk tidak pernah meninggalkan atas semua yang telah terjadi;
18. Alda, Rio, Rere, Dea, Alya, Jundi, teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Tanjung Heran yang telah memberikan pengalaman, kebersamaan, kerja sama, serta kenangan manis dalam perjalanan perkuliahan ini;
19. Aya, Andin, Wulan, Risma, Ayu, Dinda, Mayza, Monic, Eka, Sultan, Saca, Zeva, dan seluruh teman HI 22 yang tidak bisa Peneliti sebutkan satu persatu;
20. Oasis dan Payung Teduh, yang lagu-lagunya menjadi teman dalam sunyi, menemani malam-malam panjang, serta mengisi jeda di tengah proses penyusunan skripsi ini. Di antara tumpukan referensi, revisi, dan tenggat waktu, musik mereka menjadi pengingat bahwa setiap perjalanan memiliki iramanya sendiri dan setiap proses pada akhirnya akan menemukan titik akhirnya;

21. Untuk seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya, terima kasih karena telah kebersamai peneliti sejak awal perkuliahan. Terima kasih untuk segala hal yang pernah kita lalui bersama, baik dalam keadaan senang maupun susah, untuk setiap waktu, tenaga, perhatian, serta dukungan yang telah diberikan selama perjalanan ini. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari proses yang panjang, menghadirkan banyak pelajaran, kenangan, dan pengalaman yang turut mewarnai masa perkuliahan peneliti.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini;
23. Untuk diriku sendiri, Siti Nurkholiza, yang telah berjalan sejauh ini. Terima kasih karena tetap bertahan ketika jalan terasa berat, tetap berjuang ketika semangat mulai meredup, dan tetap melangkah meski tidak selalu mengetahui seberapa dekat garis akhir berada. Skripsi ini menjadi saksi dari perjalanan yang tidak selalu mudah, tentang malam-malam panjang yang diisi dengan usaha, doa, dan harapan. Terima kasih karena tidak menyerah pada keadaan dan memilih untuk terus tumbuh melalui setiap proses. Semoga setiap langkah yang telah ditempuh menjadi awal dari perjalanan-perjalanan baik yang akan datang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Hubungan Internasional, serta bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 8 Juni 2026  
Peneliti,

Siti Nurkholiza

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Landasan Teori dan Konsep.....	15
2.2.1 Sekuritisasi .....	16
2.2.2 Keamanan Nasional.....	18
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Fokus Penelitian .....	23
3.3 Sumber Data.....	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5 Teknik Analisis Data.....	26
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>28</b>
4.1 Hasil .....	28
4.1.1 Posisi TikTok di Amerika Serikat .....	28
4.2 Pembahasan.....	31
4.2.1 Analisis Sekuritisasi TikTok oleh Pemerintah Amerika Serikat .	31

4.2.2 Analisis Hubungan Pemerintah Amerika Serikat dengan TikTok Berdasarkan Konsep Keamanan Nasional .....	37
4.2.3 Keterkaitan Sekuritisasi dan Keamanan Nasional dalam Kasus TikTok di Amerika Serikat .....	58
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan .....	61
5.2 Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Komparasi Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 4.1 Tindakan Pemerintah Amerika Serikat dan Respon TikTok Pada Masa Pemerintahan Donald Trump Periode 1 .....	42
Tabel 4.2 Tindakan Pemerintah Amerika Serikat dan Respons TikTok pada Masa Pemerintahan Joe Biden.....	49
Tabel 4.3 Proses Restrukturisasi TikTok di Amerika Serikat pada Masa Pemerintahan Donald Trump Periode II.....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. 1 Data Pengguna Tiktok di 10 Negara .....	3
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir .....	21
Gambar 4. 1 Pengguna TikTok di Amerika Serikat berdasarkan Usia .....	28
Gambar 4.2 Penggunaan TikTok sebagai Sumber Berita di Amerika Serikat Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2020–2025 .....	29
Gambar 4.3 Congressional Public Hearing Amerika Serikat dengan CEO TikTok Shou Zi Chew .....	46

## DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
CFIUS	: Committee on Foreign Investment in the United States
FYP	: For Your Page
PAFACA	: Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act
UU	: Undang - Undang
ZTE	: Zhongxing Telecommunications Equipment Corporate

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

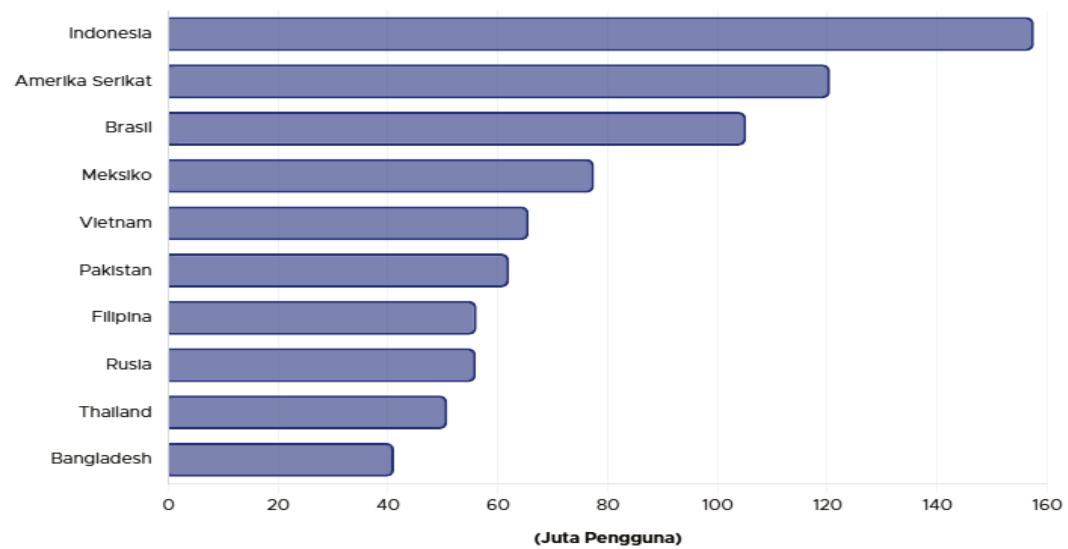
Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah lanskap hubungan internasional. Transformasi ini tidak hanya memengaruhi cara individu berkomunikasi, tetapi juga mengubah cara negara membangun pengaruh, menghasilkan informasi, dan menjalankan kepentingan nasionalnya. Media sosial berkembang menjadi infrastruktur komunikasi strategis yang berperan dalam membentuk opini publik internasional, memediasi interaksi lintas batas, serta menjadi alat penting dalam strategi negara dalam era digital (Bjola & Holmes, 2020). Kemunculan media sosial sebagai arena baru dalam hubungan internasional menandai era diplomasi digital (*digital diplomacy*), yaitu pemanfaatan teknologi digital oleh negara untuk mencapai tujuan diplomatik, menyampaikan kebijakan luar negeri, menjalin hubungan dengan masyarakat global, dan memengaruhi persepsi internasional (Barman, 2024). Diplomasi tidak lagi berada dalam ruang tertutup, namun dapat melalui ruang publik digital yang sangat dinamis, cepat, dan bersifat dua arah. Negara-negara kini bersaing tidak hanya pada aspek militer dan ekonomi saja, tetapi juga dalam penguasaan ruang informasi, kedaulatan data, serta kemampuan membentuk narasi global (Manor, 2019).

Dalam perkembangan hubungan internasional kontemporer, aktor non-negara tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelengkap negara, tetapi juga berkembang menjadi aktor yang mampu memengaruhi dinamika politik, ekonomi, dan keamanan internasional. Perusahaan teknologi global seperti Google, Meta, X, dan TikTok memiliki kemampuan untuk mengendalikan arus informasi lintas negara, membentuk opini publik, serta mengelola data pengguna dalam jumlah besar. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan digital tidak lagi dipandang

semata-mata sebagai perusahaan ekonomi, tetapi juga sebagai aktor transnasional yang memiliki pengaruh strategis dalam sistem internasional.

Perkembangan ini didukung oleh meningkatnya jumlah pengguna media sosial global dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan DataReportal tahun 2024, jumlah pengguna media sosial di dunia telah mencapai 5,4 miliar pengguna atau sekitar 62 persen populasi dunia (DataReportal, 2024.) Di tengah dinamika tersebut, TikTok muncul sebagai fenomena baru yang memiliki peran dalam politik internasional. Berbeda dengan media sosial generasi sebelumnya, TikTok didesain dengan algoritma rekomendasi yang sangat kuat sehingga mampu mengatur visibilitas informasi, memengaruhi pola konsumsi konten, dan secara tidak langsung membentuk opini publik pada skala global (Kaye et al., 2022).

TikTok merupakan aplikasi berbagi video pendek yang dikembangkan oleh ByteDance, perusahaan teknologi asal Tiongkok. Aplikasi ini pertama kali hadir dalam bentuk Douyin pada tahun 2016 untuk pasar Tiongkok, sebelum kemudian diluncurkan sebagai TikTok untuk pengguna internasional pada 2017 (Techtarget, 2023). Perkembangan TikTok semakin cepat setelah ByteDance mengakuisisi platform Musical.ly pada tahun 2017 dengan nilai sekitar US\$800 juta hingga US\$1 miliar, lalu menggabungkannya secara resmi ke dalam TikTok pada Agustus 2018, sehingga seluruh pengguna Musical.ly berpindah ke TikTok secara otomatis (Britannica, 2023). Secara fungsional, TikTok dirancang sebagai aplikasi yang memungkinkan pengguna membuat, mengedit, dan membagikan video pendek yang biasanya disertai musik latar, filter, efek visual, serta fitur kreatif lain yang memudahkan proses pembuatan konten bahkan bagi pengguna yang tidak memiliki kemampuan tinggi dalam pembuatan video (*What Is TikTok?*, 2020.)



Sumber: DataReportal

GoodStats

Gambar 1. 1 Data Pengguna TikTok di 10 Negara  
Sumber. Goodstats, 2020.

Pada Gambar 1 di atas menunjukkan jumlah pengguna TikTok di sepuluh negara dengan pengguna terbesar di dunia berdasarkan data DataReportal yang diolah oleh GoodStats. Dari grafik tersebut, Amerika Serikat (AS) dengan sekitar 116 juta pengguna menempati urutan kedua teratas setelah Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa TikTok telah menjadi platform global yang tidak hanya populer di negara asalnya, tetapi juga mendominasi pasar di negara-negara dengan populasi besar.

Perkembangan TikTok berlangsung sangat cepat dibandingkan platform media sosial lainnya. Pada tahun 2024 TikTok adalah aplikasi yang paling banyak diunduh dengan 773 juta unduhan. Aplikasi ini telah diunduh lebih dari lima miliar kali sejak diluncurkan (Curry, 2026.) Fenomena tersebut menunjukkan bahwa TikTok telah berkembang menjadi salah satu *platform* digital global paling berpengaruh dalam sistem komunikasi internasional kontemporer. Keberhasilan TikTok memasuki pasar global, khususnya Amerika Serikat, juga menunjukkan perubahan dalam peta dominasi teknologi digital internasional. Jika sebelumnya platform digital global didominasi perusahaan Amerika seperti Google, Facebook, Instagram, dan YouTube, maka keberhasilan TikTok menunjukkan bahwa perusahaan teknologi Tiongkok mulai mampu bersaing dalam ruang digital global.

Bagi Amerika Serikat, jumlah pengguna besar memperlihatkan bahwa TikTok memiliki pengaruh sosial dan ekonomi yang sangat besar, terutama di kalangan muda yang menjadi target utama platform tersebut. Besarnya jumlah pengguna ini sekaligus menjelaskan mengapa pemerintah AS memperhatikan secara serius implikasi keamanan data dan pengaruh politik yang mungkin timbul dari aplikasi ini, karena potensi dampaknya meluas ke jutaan warga negara AS (Indrayani, I., & Maharani, T,2022). Pemerintahan Donald Trump menganggap bahwa kepemilikan atas aplikasi TikTok oleh ByteDance, yang berkaitan dengan Tiongkok, menghadirkan potensi ancaman terhadap keamanan nasional AS, terutama terkait pengumpulan data pengguna, algoritma tindakan, dan kemungkinan intervensi asing (Indrayani, I., & Maharani, T,2022).

Kekhawatiran pemerintah Amerika Serikat terhadap TikTok bukan muncul tiba-tiba, melainkan telah berkembang sejak masa pemerintahan Presiden Donald Trump. TikTok dipandang sebagai sesuatu yang lebih kompleks daripada sebatas aplikasi berbagi video, ada kemungkinan potensi risiko keamanan yang terkait dengan perusahaan teknologi asing yang beroperasi di AS berdasarkan Undang-Undang Intelijen Nasional 2017 *National Intelligence Law of the People's Republic of China* Pasal 7 yang berbunyi "Semua organisasi dan warga negara wajib mendukung, membantu, dan bekerja sama dengan upaya intelijen nasional sesuai dengan hukum, dan wajib melindungi rahasia kerja intelijen nasional yang mereka ketahui. Negara berkewajiban untuk melindungi individu dan organisasi yang mendukung, membantu, dan bekerja sama dengan upaya intelijen nasional." dan Pasal 14 yang berbunyi "Lembaga-lembaga intelijen nasional yang secara sah melaksanakan kegiatan intelijen dapat meminta agar lembaga, organisasi, dan warga negara terkait memberikan dukungan, bantuan, dan kerja sama yang diperlukan." UU inilah yang menjadi dasar kekhawatiran pemerintah AS kepada TikTok (China Law Translate , 2017).

Kekhawatiran ini bukan hanya terkait isu privasi, tetapi juga berkaitan dengan risiko keamanan nasional misalnya potensi pemanfaatan data untuk kegiatan pengaruh politik (*political influence*), manipulasi opini publik, hingga penggunaan informasi sensitif dalam konteks kompetisi strategis AS-Tiongkok. Kemungkinan algoritma rekomendasi TikTok mampu mengatur eksposur informasi

secara masif, misalnya, dengan menaikkan atau menurunkan visibilitas konten tertentu. Dalam konteks hubungan AS-Tiongkok yang semakin tegang, potensi manipulasi informasi oleh aktor asing dinilai sebagai ancaman strategis. Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara besarnya pengguna, luasnya data yang dikumpulkan, serta kemampuan ByteDance untuk mengakses informasi TikTok, menciptakan risiko keamanan yang tidak bisa diabaikan (Zeng, J., & Kaye, D, 2022).

Dinamika antara Pemerintah Amerika Serikat dengan TikTok dimulai dengan pembentukan *Committee on Foreign Investment in the United States* pada tahun 2019 yang secara resmi memulai penyelidikan terhadap akuisisi tersebut, menandai tahap awal masuknya isu TikTok ke dalam agenda kebijakan nasional AS. Temuan awal CFIUS terkait kemungkinan akses pemerintah Tiongkok atas data pengguna AS kemudian memperkuat persepsi ancaman tersebut dan mendorong lembaga-lembaga federal lain untuk memberikan perhatian lebih serius (CRS, 2020). Meski ByteDance membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa data pengguna di AS disimpan di Amerika Serikat dan Singapura, pemerintah tetap menganggap ancaman tersebut sebagai sesuatu yang harus ditindaklanjuti. Masuknya isu TikTok ke ranah investigasi formal menandakan bahwa pemerintah AS tidak lagi menganggap TikTok sebagai aplikasi hiburan semata, melainkan sebagai ancaman. Setelah isu TikTok diposisikan sebagai ancaman keamanan nasional, pemerintah Amerika Serikat kemudian mengambil berbagai kebijakan untuk mengatasi ancaman tersebut.

Pada 6 Agustus 2020, Presiden Trump menandatangani *Executive Order on Addressing the Threat Posed by TikTok* yang menyatakan bahwa penyebaran aplikasi yang dimiliki perusahaan Tiongkok seperti TikTok dapat “mengancam keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi AS” karena kemampuan pengumpulan data serta potensi akses oleh pemerintahan asing, sehingga perlu diambil langkah perlindungan nasional melalui regulasi atau pembatasan (Federal Register, 2020).

Hubungan antara Pemerintah Amerika Serikat dan TikTok tidak berlangsung secara satu arah. Berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat juga direspons oleh TikTok melalui berbagai strategi, seperti gugatan hukum, upaya negosiasi, penguatan sistem keamanan data, hingga kerja sama dengan perusahaan Amerika Serikat. Respons tersebut menunjukkan bahwa TikTok tidak hanya menjadi objek kebijakan negara, tetapi juga bertindak sebagai aktor non-negara yang berupaya mempertahankan kepentingannya dalam sistem internasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, hubungan antara Pemerintah Amerika Serikat dan TikTok menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana perkembangan teknologi digital dapat memunculkan dinamika baru dalam hubungan antara negara dan perusahaan teknologi global. Selain itu, kasus TikTok juga menunjukkan bagaimana isu teknologi dapat berkembang menjadi isu keamanan nasional yang melibatkan berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan strategis. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis proses sekuritisasi TikTok oleh Pemerintah Amerika Serikat serta menjelaskan kasus TikTok melalui perspektif keamanan nasional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perkembangan platform media sosial global telah memunculkan berbagai dinamika baru dalam hubungan antara negara dan perusahaan teknologi. Salah satu kasus yang mendapat perhatian besar adalah keberadaan TikTok di Amerika Serikat. Sejak tahun 2019, pemerintah Amerika Serikat mulai menaruh perhatian terhadap TikTok karena kekhawatiran terkait keamanan data pengguna dan potensi pengaruh perusahaan teknologi asing terhadap keamanan nasional. Kondisi tersebut mendorong munculnya berbagai tindakan dari pemerintah Amerika Serikat yang didasarkan pada pertimbangan keamanan nasional. Di sisi lain, TikTok juga memberikan berbagai respons untuk mempertahankan operasionalnya di Amerika Serikat. Interaksi antara tindakan pemerintah Amerika Serikat dan respons TikTok kemudian membentuk dinamika hubungan yang terus berkembang pada berbagai periode pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan dari penelitian ini

adalah “bagaimana proses sekuritisasi TikTok oleh Pemerintah Amerika Serikat serta kaitannya dengan keamanan nasional Amerika Serikat?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses sekuritisasi TikTok oleh Pemerintah Amerika Serikat dan menjelaskan kasus TikTok melalui perspektif keamanan nasional.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua jenis manfaat, yaitu:

a. Manfaat Akademis:

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam studi keamanan internasional, keamanan nasional, dan hubungan antara negara dengan perusahaan teknologi global. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana perkembangan teknologi digital dapat memunculkan isu keamanan baru yang melibatkan aktor non-negara dalam sistem internasional.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai teori sekuritisasi dengan menunjukkan bagaimana pemerintah Amerika Serikat mengonstruksikan TikTok sebagai isu yang berkaitan dengan keamanan nasional. Penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris terhadap kajian keamanan digital dengan menyoroti keterkaitan antara perlindungan data, kedaulatan informasi, dan persaingan teknologi dalam hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok.

Melalui analisis dinamika hubungan antara pemerintah Amerika Serikat dan TikTok pada periode 2019–2026, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu keamanan digital, regulasi platform teknologi global, serta perkembangan ancaman non-tradisional dalam studi Hubungan Internasional.

b. Manfaat Praktis:

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana isu teknologi digital dapat berkembang menjadi perhatian keamanan nasional serta bagaimana negara merespons potensi risiko yang muncul dari kehadiran platform digital asing. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan keamanan data, tata kelola platform digital, dan perlindungan kepentingan nasional di era digital. publik dibentuk untuk mengelola risiko tersebut.
2. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam mengkaji isu keamanan digital, sekuritisasi, serta hubungan antara negara dan perusahaan teknologi global. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan studi mengenai transformasi ancaman keamanan kontemporer dan dampaknya terhadap dinamika hubungan internasional.
3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai keterkaitan antara perkembangan teknologi digital, keamanan data, dan kepentingan nasional, sehingga dapat meningkatkan kesadaran terhadap berbagai isu yang muncul dalam penggunaan platform digital global.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Giandi Kartasmita dan Andrea Prisca Kurnadi tahun 2021 berjudul “*The Securitization of Chinese Technology Companies in the United States of America*”. Penelitian Kartasmita dan Kurnadi ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan menjelaskan proses sekuritisasi terhadap perusahaan teknologi asal Tiongkok yaitu Huawei dan ZTE oleh Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Data yang digunakan bersumber dari studi literatur, laporan kebijakan pemerintah, dokumen hukum, dan berbagai artikel media daring. Penelitian ini berlandaskan pada teori sekuritisasi dari *Copenhagen School*, yang menjelaskan bagaimana suatu isu dikonstruksikan sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan nasional melalui tindakan wacana oleh aktor negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Trump berhasil membangun persepsi ancaman terhadap perusahaan teknologi Tiongkok melalui klaim ancaman terhadap keamanan, privasi, dan kebebasan masyarakat AS. Langkah ini kemudian memengaruhi persepsi publik dan mendukung kebijakan pelarangan produk teknologi asal Tiongkok. Penelitian pertama membantu peneliti dalam mengetahui bagaimana proses sekuritisasi perusahaan-perusahaan Tiongkok di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Aditya Wahidin dan Yuniarti tahun 2023 dalam artikel berjudul “*Upaya Amerika Serikat Mengakuisisi TikTok Tahun 2020.*” Ibnu dan Wahidin menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur yang bersumber dari dokumen pemerintah, jurnal, buku, dan berbagai sumber internet. Penelitian tersebut menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci dan konsep nasionalisme

ekonomi dari Dinc dan Erel untuk menjelaskan upaya Amerika Serikat mengakuisisi TikTok pada masa pemerintahan Donald Trump tahun 2020. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pemerintah Amerika Serikat menggunakan berbagai instrumen politik dan ekonomi untuk mendorong penjualan aset TikTok kepada perusahaan Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya popularitas TikTok dipandang Amerika Serikat sebagai tantangan terhadap dominasi perusahaan teknologi dan media sosial Amerika di pasar digital global. TikTok tidak hanya dianggap sebagai ancaman keamanan data pengguna, tetapi juga sebagai ancaman terhadap hegemoni ekonomi dan teknologi Amerika Serikat yang selama ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan Silicon Valley seperti Google, Meta, dan Twitter. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil pemerintah Amerika Serikat tidak semata-mata dilandasi pertimbangan keamanan nasional, melainkan juga berkaitan dengan kepentingan mempertahankan posisi dominan Amerika Serikat dalam industri teknologi global.

Ibnu dan Wahidin menemukan bahwa upaya Amerika Serikat mengakuisisi TikTok dilakukan melalui empat strategi utama nasionalisme ekonomi. Pertama, *public interest*, yaitu penggunaan alasan keamanan nasional sebagai dasar untuk membatasi operasional TikTok. Kedua, moral persuasion, yaitu dukungan pemerintah terhadap perusahaan domestik Amerika Serikat agar mengambil alih TikTok. Ketiga, *playing for time*, yaitu pemberian tenggat waktu melalui *Executive Order* yang mengharuskan ByteDance menjual aset TikTok di Amerika Serikat dalam jangka waktu tertentu. Keempat, *creating national champion*, yaitu mendorong perusahaan Amerika Serikat seperti Microsoft, Oracle, dan Walmart untuk menjadi pihak yang mampu mengakuisisi TikTok dan mempertahankan dominasi teknologi Amerika Serikat.

Penelitian Wahidin dan Yuniarti membantu peneliti memahami bahwa kebijakan Amerika Serikat terhadap TikTok tidak hanya didorong oleh kekhawatiran terhadap keamanan nasional, tetapi juga berkaitan dengan upaya mempertahankan hegemoni teknologi, dominasi ekonomi digital, dan posisi strategis Amerika Serikat dalam persaingan teknologi global dengan Tiongkok. Temuan ini relevan dengan penelitian penulis karena menunjukkan bahwa

hubungan antara pemerintah Amerika Serikat dan TikTok melibatkan aspek keamanan, ekonomi, teknologi, dan politik yang saling berkaitan.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda dan Faris Al-Fadhat tahun 2022 dalam artikel berjudul *“The Political Economy of the US-China Cybersecurity Relations and Trade War Under the Trump Administration.”* Penelitian Huda dan Faris menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji hubungan keamanan siber antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada masa pemerintahan Donald Trump, khususnya dalam konteks perang dagang dan persaingan teknologi global. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen kebijakan pemerintah, laporan institusi, serta berbagai literatur akademik yang membahas keamanan siber dan hubungan ekonomi politik internasional.

Fokus penelitiannya pada perubahan kebijakan Amerika Serikat pada tahun 2019 yang mengarah pada pendekatan proteksionis, termasuk pembatasan terhadap teknologi dan perusahaan asal Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keamanan siber Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump tidak hanya didorong oleh faktor keamanan nasional, tetapi juga oleh kepentingan ekonomi dan persaingan dalam dominasi teknologi global. Kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi data besar warga negara Amerika Serikat serta mempertahankan posisi Amerika Serikat dalam transformasi teknologi global. Namun, kebijakan ini juga memperkuat eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, khususnya dalam sektor teknologi dan data digital. Penelitian ini membantu peneliti dalam memahami bahwa kebijakan pemerintah Amerika Serikat terhadap perusahaan teknologi Tiongkok, termasuk TikTok, tidak dapat dilepaskan dari konteks yang lebih luas yaitu persaingan geopolitik dan ekonomi global. Dengan demikian, isu TikTok tidak hanya berkaitan dengan keamanan data, tetapi juga merupakan bagian dari strategi Amerika Serikat dalam mempertahankan dominasi teknologi global.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Riyanto Adji, Putri Hamsiah Rofi, Ratna Widyantari, dan Sarrah Adedhia Pasya tahun 2025 dengan judul *“TikTok Ban in the US: Between Cybersecurity Issues and Control of Global Tech Markets”* menggunakan metode campuran. Landasan teorinya adalah teori perdagangan internasional dan keamanan siber. Penelitian ini menemukan

bahwa kebijakan pelarangan TikTok oleh AS dilandasi dua faktor utama, yaitu kekhawatiran terhadap keamanan data pengguna (*cybersecurity concerns*) dan persaingan geopolitik antara AS dan Tiongkok dalam menguasai pasar teknologi global. Meskipun dilakukan dengan dalih keamanan nasional, kebijakan tersebut juga memiliki tujuan politik ekonomi yang kuat. Penelitian Riyanto ini membantu peneliti memahami bahwa kebijakan pelarangan TikTok tidak hanya dilandasi oleh kekhawatiran terhadap keamanan data pengguna, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya Amerika Serikat untuk mempertahankan kontrol atas pasar teknologi global dan melindungi kepentingan ekonominya.

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Sun, Pinkse, dan Bleda (2025) dalam artikel berjudul *Social Media Platforms' Use of Nonmarket Strategy to Manage Politically Contentious Issues in Host Countries: The Case of TikTok in the US Market*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis bagaimana platform media sosial menggunakan strategi non-market dalam menghadapi tekanan politik di negara tempat mereka beroperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TikTok menggunakan berbagai strategi seperti komunikasi publik, kerja sama dengan perusahaan domestik, serta negosiasi kebijakan untuk mempertahankan operasionalnya di Amerika Serikat. Jurnal ini membantu peneliti dalam memahami bagaimana perusahaan teknologi multinasional merespons tekanan regulasi dari pemerintah negara tuan rumah.

Tabel 2. 1 Komparasi Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Teori dan Konsep	Metode	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kartasasmitta dan Kurnadi (2021) – <i>The Securitization of Chinese Technology Companies</i>	Teori Sekuritisasi	Kualitatif, deskriptif	Proses sekuritisasi perusahaan teknologi Tiongkok (Huawei, ZTE) di AS	Pemerintah AS berhasil membingkai perusahaan Tiongkok sebagai ancaman keamanan nasional melalui wacana politik, sehingga legitimasi

No.	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Teori dan Konsep	Metode	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>in the United States of America</i>				kebijakan pembatasan terbentuk
2.	Ibnu Aditya Wahidin dan Yuniarti (2023) – Upaya Amerika Serikat Mengakuisi TikTok Tahun 2020.	Teori Hegemoni Dan Konsep Nasionalisme	Kualitatif	Upaya Amerika Serikat mengakuisisi TikTok pada masa pemerintahan Donald Trump tahun 2020	Amerika Serikat berupaya mengakuisisi TikTok untuk mempertahankan hegemoninya dalam sektor media sosial dan teknologi digital global melalui penggunaan isu keamanan nasional, dukungan terhadap perusahaan domestik, pembatasan waktu melalui Executive Order, serta pembentukan national champion.
3.	Huda dan Al-Fadhat (2022) – <i>The Political Economy of US-China Cybersecurity Relations</i>	Ekonomi politik internasional & keamanan siber	Kualitatif	Hubungan keamanan siber AS–Tiongkok dalam konteks perang dagang	Kebijakan AS dipengaruhi tidak hanya oleh keamanan, tetapi juga kepentingan ekonomi dan persaingan teknologi global
4.	Riyanto et al. (2025) – <i>TikTok Ban in the US: Between Cybersecurity Issues and Control of Global Tech Markets</i>	Keamanan siber dan perdagangan internasional	Campuran	Kebijakan pelarangan TikTok dan faktor yang mempengaruhi	Kebijakan didorong oleh dua faktor utama yaitu keamanan data dan persaingan geopolitik/ekonomi global

No.	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Teori dan Konsep	Metode	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Sun, Pinkse, dan Bleda (2025) – <i>Social Media Platforms' Use of Nonmarket Strategy to Manage Politically Contentious Issues in Host Countries: The Case of TikTok in the US Market</i>	Nonmarket Strategy, Digital Platform, dan Institutional Pressure	Kualitatif	Strategi nonmarket TikTok dalam menghadapi tekanan politik dan regulasi pemerintah AS	TikTok menggunakan berbagai strategi nonmarket seperti peningkatan moderasi konten, jalur hukum, lobbying, komunikasi publik, dan mobilisasi pengguna untuk mempertahankan operasionalnya di AS di tengah isu keamanan data dan tekanan geopolitik AS–Tiongkok.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Berdasarkan lima penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian membahas isu TikTok dalam konteks keamanan nasional, keamanan siber, serta persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Penelitian seperti Kartasmita dan Kurnadi tahun 2021 menekankan pada proses sekuritisasi perusahaan teknologi Tiongkok oleh pemerintah Amerika Serikat, sedangkan penelitian Wahidin dan Yuniarti tahun 2023 menunjukkan bahwa kebijakan Amerika Serikat terhadap TikTok juga berkaitan dengan upaya mempertahankan hegemoni dan dominasi teknologi digital global. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa respons Amerika Serikat terhadap perusahaan teknologi Tiongkok tidak hanya didorong oleh pertimbangan keamanan, tetapi juga oleh kepentingan strategis yang lebih luas."

Sementara itu, penelitian oleh Huda dan Al-Fadhat tahun 2022 menunjukkan bahwa kebijakan Amerika Serikat terhadap perusahaan teknologi Tiongkok tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keamanan, tetapi juga oleh kepentingan ekonomi dan persaingan dalam dominasi teknologi global. Penelitian

ini memperluas pemahaman bahwa isu teknologi digital merupakan bagian dari dinamika politik ekonomi internasional. Di sisi lain, penelitian Riyanto et al. dan Sun, Pinkse, dan Bleda menunjukkan bahwa dinamika hubungan antara negara dan perusahaan teknologi tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga melibatkan strategi perusahaan dalam merespons tekanan kebijakan melalui berbagai pendekatan *non-market*. Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada satu periode pemerintahan, tanpa mengkaji secara menyeluruh dinamika kebijakan dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis dinamika hubungan antara pemerintah Amerika Serikat dan TikTok pada periode 2019–2026 yang mencakup masa pemerintahan Donald Trump periode pertama, Joe Biden, dan Donald Trump periode kedua. Penelitian ini berfokus pada perubahan dan perkembangan hubungan antara pemerintah Amerika Serikat dan TikTok dalam konteks isu keamanan nasional, kebijakan pemerintah, serta berbagai tindakan dan respons yang muncul dalam hubungan antara kedua pihak pada berbagai periode pemerintahan.

## **2.2 Landasan Teori dan Konsep**

Penelitian ini menggunakan teori sekuritisasi dan konsep keamanan nasional. Teori sekuritisasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah Amerika Serikat mengonstruksikan TikTok sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Sementara itu, konsep keamanan nasional digunakan untuk memahami dasar pertimbangan pemerintah Amerika Serikat dalam mengambil berbagai tindakan terhadap TikTok guna melindungi kepentingan nasional, keamanan data, dan stabilitas negara. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis dinamika hubungan antara pemerintah Amerika Serikat dan TikTok pada periode 2019–2026.

### 2.2.1 Sekuritisasi

Kajian keamanan dalam Hubungan Internasional mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Barry Buzan menjelaskan bahwa ancaman terhadap keamanan dapat muncul dari berbagai sektor kehidupan sehingga keamanan tidak dapat dibatasi hanya pada ancaman militer. Dalam bukunya, Buzan membagi keamanan ke dalam lima sektor utama, yaitu sektor militer, politik, ekonomi, sosial (*societal*), dan lingkungan. Pembagian sektor ini menunjukkan bahwa ancaman keamanan modern bersifat multidimensional dan saling berkaitan satu sama lain.

1. Sektor militer berkaitan dengan kemampuan ofensif dan defensif negara serta persepsi ancaman antarnegara.
2. Sektor politik berkaitan dengan stabilitas organisasi negara, sistem pemerintahan, serta legitimasi politik.
3. Sektor ekonomi berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, pasar, dan stabilitas ekonomi.
4. Sektor sosial (*societal*) berkaitan dengan identitas kolektif, budaya, bahasa, agama, dan nilai sosial masyarakat.
5. Sektor lingkungan berkaitan dengan keberlanjutan biosfer dan hubungan manusia dengan lingkungan hidup

Perluasan konsep keamanan yang dikembangkan Barry Buzan kemudian menjadi dasar lahirnya teori sekuritisasi (*securitization theory*) yang dikembangkan oleh *Copenhagen School*. Teori sekuritisasi merupakan bagian dari *Copenhagen School of Security Studies* yang diperkenalkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde dalam buku *Security: A New Framework for Analysis (1998)*. Teori sekuritisasi diartikan sebagai proses di mana isu-isu yang sebelumnya dianggap sebagai masalah politik normal dipindahkan ke ranah keamanan, sehingga memungkinkan langkah-langkah luar biasa untuk menanganinya. Teori sekuritisasi memandang bahwa masalah keamanan tidak lagi menjadi kondisi objektif tetapi menjadi suatu hasil dari proses konstruksi sosial.

## Konsep-Konsep Utama dalam Teori Sekuritisasi

### 1. *Speech Act*

Sekuritisasi terjadi melalui tindakan bicara yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi di mana pernyataan membuat isu menjadi "aman" atau "tidak aman". *Speech Act* biasanya dilakukan melalui pernyataan resmi pemerintah, pidato politik, dokumen kebijakan, atau pernyataan publik.

### 2. *Securitizing actor*

*Securitizing actor* merupakan aktor yang menyatakan bahwa suatu isu merupakan ancaman terhadap keamanan. Aktor ini merupakan aktor politik yang memiliki otoritas dan legitimasi untuk mengemukakan klaim keamanan kepada publik atau institusi politik.

### 3. *Audience*

Audiens adalah kelompok yang harus diyakinkan oleh aktor sekuritisasi. Sekuritisasi berhasil jika audiens menerima pembingkaiannya tersebut dan mendukung langkah-langkah luar biasa.

### 4. *Referent object*

Referent Object Adalah pihak atau entitas yang dianggap terancam oleh suatu isu keamanan, biasanya berkaitan dengan hal-hal yang dianggap memiliki nilai penting untuk dilindungi, seperti keamanan negara, kedaulatan nasional, stabilitas politik atau keamanan masyarakat.

### 5. *Extraordinary measures*

Ketika suatu isu berhasil disekuritisasi, maka pemerintah dapat mengambil tindakan luar biasa yang tidak selalu mengikuti prosedur politik normal. Tindakan ini dapat berupa kebijakan yang lebih tegas atau langkah-langkah luar biasa untuk mengatasi ancaman yang dianggap serius

Sebuah isu dapat menjadi isu keamanan ketika aktor sekuritisasi (*securitizing actor*) berhasil membingkai isu tersebut sebagai ancaman eksistensial terhadap *referent object* atau objek yang dilindungi, seperti negara, masyarakat, atau sistem politik. Ketika ancaman tersebut diterima oleh audiens, maka negara memperoleh legitimasi untuk melakukan tindakan luar biasa (*extraordinary*

*measures*) di luar prosedur normal (Buzan et al., 1998). Inti dari sekuritisasi terletak pada *speech act*, yaitu tindakan wacana di mana aktor politik menyatakan bahwa suatu isu merupakan ancaman keamanan. Dengan kata lain, ancaman tidak hanya ada, tetapi diciptakan melalui ujaran politik yang kemudian diyakini oleh publik atau institusi politik.

### **2.2.2 Keamanan Nasional**

Keamanan nasional merupakan salah satu konsep fundamental dalam studi Hubungan Internasional dan kajian keamanan. Secara tradisional, keamanan nasional dipahami sebagai kemampuan suatu negara untuk melindungi wilayah, kedaulatan, dan warga negaranya dari ancaman militer eksternal. Salah satu definisi mengenai keamanan nasional dikemukakan oleh Walter Lippmann. Menurut Lippmann, suatu negara dapat dikatakan aman apabila negara tersebut tidak harus mengorbankan kepentingan intinya untuk menghindari perang dan mampu mempertahankan kepentingan tersebut apabila menghadapi ancaman melalui kemenangan dalam perang. Definisi ini menunjukkan bahwa keamanan nasional pada awalnya sangat erat kaitannya dengan kemampuan negara dalam mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan kepentingan nasional dari ancaman eksternal, terutama ancaman militer (Lippmann, 1943).

Arnold Wolfers mendefinisikan keamanan nasional sebagai kondisi tidak adanya ancaman terhadap nilai-nilai yang telah diperoleh suatu negara. Keamanan bersifat relatif, karena ancaman dapat bervariasi bergantung pada persepsi aktor negara terhadap lingkungan internasionalnya (Wolfers, 1952). Perkembangan lingkungan internasional yang semakin kompleks kemudian mendorong perluasan makna keamanan nasional. Barry Buzan menjelaskan bahwa keamanan tidak lagi dapat dipahami hanya dalam konteks militer semata. Menurut Buzan, keamanan berkaitan dengan kemampuan suatu negara untuk mempertahankan identitas, integritas, dan keberlangsungan hidupnya dari berbagai bentuk ancaman. Oleh karena itu, ancaman terhadap keamanan nasional dapat muncul tidak hanya dari sektor militer, tetapi juga dari sektor politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan (Buzan, 1991).

Menurut Witarti tahun 2011, terdapat empat elemen utama yang membentuk konsep keamanan nasional, yaitu kedaulatan, kepentingan nasional, ancaman, dan lingkungan keamanan. Keempat elemen tersebut saling berkaitan dan menentukan bagaimana suatu negara memandang keamanan serta merespons berbagai tantangan yang dihadapinya.

#### 1. Kedaulatan

Kedaulatan merupakan kemampuan suatu negara untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya secara mandiri tanpa berada di bawah tekanan atau campur tangan pihak lain. Kedaulatan juga menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara untuk mengatur wilayah dan masyarakat yang berada di bawah yurisdiksinya. Dalam konteks domestik, kedaulatan memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk menegakkan kebijakan dan hukum terhadap warga negara. Sementara itu, dalam konteks internasional, kedaulatan berkaitan dengan kemampuan negara mempertahankan kemerdekaan politiknya serta menjaga agar tidak terjadi intervensi dari negara lain. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kedaulatan menjadi salah satu tujuan utama dalam penyelenggaraan keamanan nasional karena hilangnya kedaulatan dapat mengancam eksistensi negara itu sendiri.

#### 2. Kepentingan Nasional

Setiap negara memiliki tujuan dan kepentingan tertentu yang ingin dicapai serta dipertahankan. Kepentingan nasional menjadi pedoman utama dalam perumusan kebijakan negara, termasuk kebijakan keamanan dan politik luar negeri. Kepentingan yang bersifat vital umumnya berkaitan dengan keberlangsungan negara, seperti perlindungan wilayah, penduduk, dan kedaulatan. Ancaman terhadap kepentingan-kepentingan tersebut sering kali dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan nasional sehingga negara cenderung mengambil tindakan yang tegas untuk melindunginya.

#### 3. Ancaman

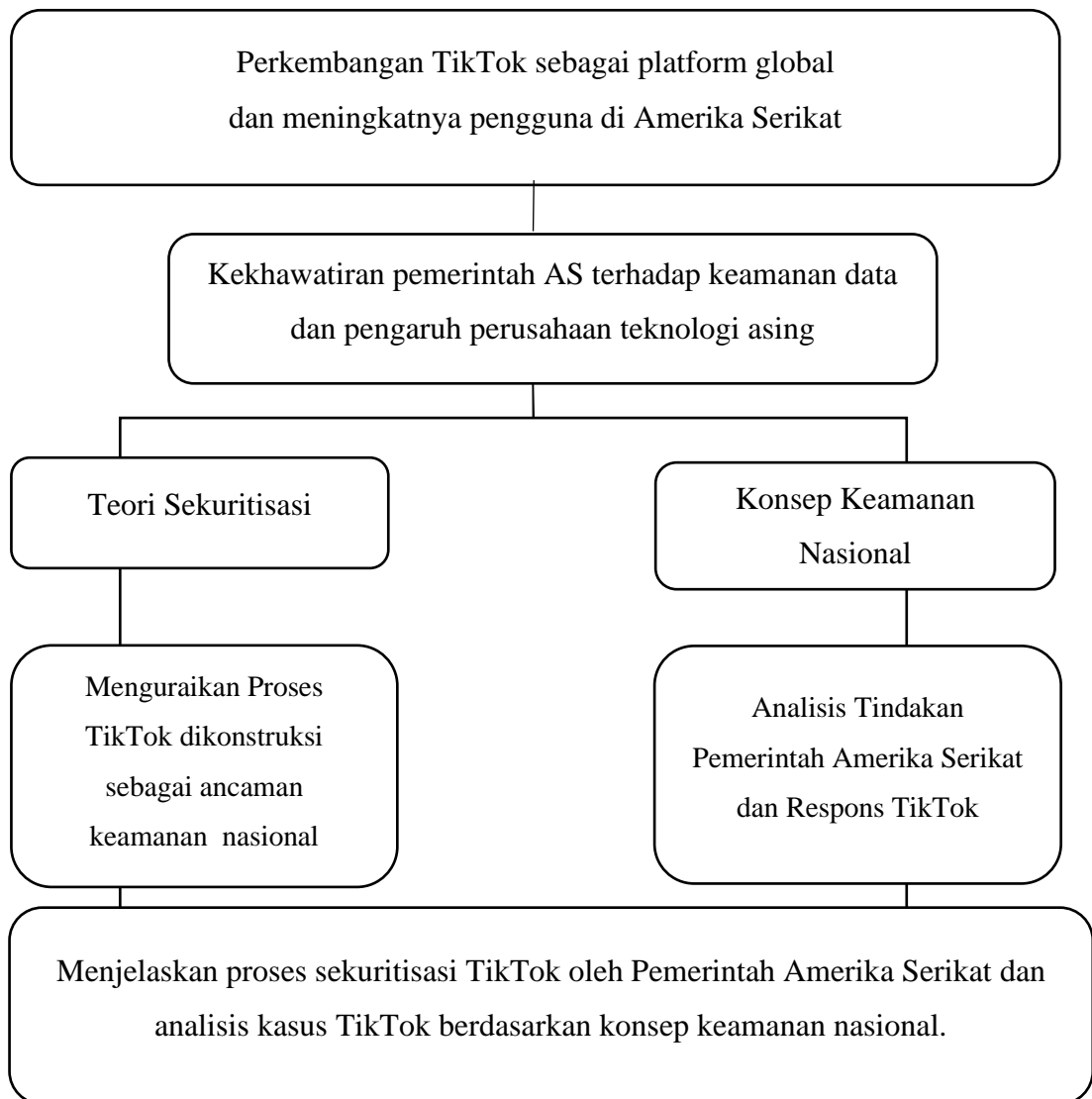
Ancaman umumnya dipahami sebagai ancaman militer yang berasal dari negara lain, seperti perang, agresi, maupun perlombaan senjata.

Namun, perkembangan lingkungan internasional pasca Perang Dingin menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan nasional tidak lagi terbatas pada aspek militer. Ancaman dapat muncul dalam bentuk nonmiliter, seperti terorisme, kejahatan transnasional, kemiskinan, pandemi, degradasi lingkungan, hingga perkembangan teknologi yang berpotensi mengganggu stabilitas negara. Oleh karena itu, keamanan nasional pada era kontemporer menuntut negara untuk mampu mengidentifikasi berbagai bentuk ancaman, baik yang bersifat tradisional maupun nontradisional. Persepsi negara terhadap ancaman inilah yang kemudian memengaruhi strategi dan kebijakan keamanan yang diambil.

#### 4. Lingkungan

Keamanan nasional tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan domestik maupun internasional yang melingkupinya. Situasi politik dalam negeri, hubungan dengan negara lain, dinamika kawasan, serta perubahan dalam sistem internasional dapat memengaruhi tingkat keamanan suatu negara. Perubahan lingkungan global setelah berakhirnya Perang Dingin, misalnya, telah menciptakan berbagai tantangan baru yang tidak selalu dapat diselesaikan oleh negara secara mandiri. Ancaman yang muncul di suatu negara juga dapat meluas ke negara lain melalui efek *spill over*, sehingga menciptakan keterkaitan antara keamanan nasional, keamanan kawasan, dan keamanan global. Oleh sebab itu, negara perlu memahami lingkungan strategis yang berkembang agar dapat merumuskan kebijakan keamanan yang sesuai dengan tantangan yang dihadapinya.

### 2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir  
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian untuk proses sekuritisasi TikTok oleh Pemerintah Amerika Serikat serta mengkaji kasus TikTok berdasarkan perspektif keamanan nasional. Melalui metode penelitian yang digunakan, penelitian ini berupaya memahami bagaimana TikTok dikonstruksikan sebagai ancaman keamanan nasional dan bagaimana pertimbangan keamanan nasional memengaruhi berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Amerika Serikat. Bab ini terdiri atas lima bagian utama, yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika hubungan antara pemerintah Amerika Serikat dan TikTok pada periode 2019 - 2026. Metode kualitatif membantu peneliti untuk menganalisis fenomena sosial dan politik secara komprehensif melalui interpretasi terhadap berbagai sumber data yang relevan.

Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial (Creswell, 2018). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah Amerika Serikat terhadap TikTok berkembang dari waktu ke waktu serta bagaimana interaksi antara negara dan perusahaan teknologi multinasional tersebut berlangsung.

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah proses sekuritisasi TikTok oleh Pemerintah Amerika Serikat dan menjelaskan kasus TikTok melalui perspektif keamanan nasional. Penelitian ini menempatkan pemerintah Amerika Serikat sebagai aktor negara dan TikTok sebagai perusahaan teknologi global yang beroperasi dalam sistem internasional. Interaksi antara kedua aktor tersebut dianalisis melalui berbagai tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap TikTok serta berbagai respons yang dilakukan oleh TikTok dalam menghadapi kebijakan tersebut. Dengan menggunakan teori sekuritisasi dan konsep keamanan nasional untuk menjelaskan bagaimana persepsi ancaman tersebut memengaruhi tindakan pemerintah Amerika Serikat terhadap TikTok dan bagaimana TikTok merespons berbagai tekanan politik, hukum, dan regulasi yang muncul selama periode penelitian.

Untuk mempermudah proses analisis, fokus penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek utama, yaitu:

1. Proses sekuritisasi TikTok oleh pemerintah Amerika Serikat, yaitu bagaimana TikTok diposisikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional melalui berbagai pernyataan politik dan kebijakan pemerintah.
2. Tindakan dan kebijakan pemerintah Amerika Serikat terhadap TikTok yang didasarkan pada pertimbangan keamanan nasional, termasuk investigasi keamanan nasional, pembatasan operasional, tuntutan divestasi, serta regulasi yang berkaitan dengan platform digital asing.
3. Respons TikTok terhadap berbagai tindakan dan kebijakan pemerintah Amerika Serikat, baik melalui jalur hukum, komunikasi publik, kerja sama dengan pihak domestik Amerika Serikat, maupun berbagai strategi lain yang dilakukan untuk mempertahankan operasional perusahaan di Amerika Serikat.

Adapun batasan penelitian ini meliputi:

- a) Ruang lingkup waktu: 2019-2026
- b) Ruang lingkup wilayah: Amerika Serikat
- c) Ruang lingkup topik: Proses sekuritisasi TikTok oleh Pemerintah Amerika Serikat dan analisis kasus TikTok berdasarkan konsep keamanan nasional.

### 3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang tersedia secara publik. Data sekunder yang digunakan meliputi: dokumen resmi pemerintah, pernyataan perusahaan, publikasi akademik, dan berita.

Sumber data yang digunakan meliputi:

1. Dokumen resmi Pemerintah Amerika Serikat, seperti *Executive Orders*, pernyataan Departemen Perdagangan, serta dokumen kebijakan terkait keamanan digital.
2. Pernyataan resmi TikTok dan ByteDance, termasuk siaran pers, laporan transparansi, dan dokumen kebijakan perusahaan.
3. Dokumen hukum dan putusan pengadilan terkait gugatan TikTok terhadap pemerintah AS.
4. Literatur akademik berupa jurnal ilmiah dan buku yang membahas perusahaan multinasional, keamanan digital, dan hubungan negara-aktor non-negara.
5. Media internasional kredibel seperti *Reuters*, *The New York Times*, dan laporan lembaga riset seperti *Brookings Institution* dan *Congressional Research Service*.

- 1) Reuters <https://www.reuters.com>
- 2) The New York Times <https://www.nytimes.com>
- 3) BBC News <https://www.bbc.com/news>
- 4) Bloomberg <https://www.bloomberg.com>
- 5) The Washington Post <https://www.washingtonpost.com>

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi pemerintah, pernyataan perusahaan, arsip kebijakan yang berkaitan langsung dengan kasus TikTok dan laporan penelitian yang relevan untuk membuat kerangka konseptual dan teoritis penelitian. Melalui studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan dan menelaah berbagai data yang berkaitan dengan proses sekuritisasi TikTok, pertimbangan keamanan nasional Amerika Serikat, tindakan pemerintah Amerika Serikat terhadap TikTok, serta respons yang diberikan oleh TikTok selama periode 2019–2026.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan beberapa langkah. Pertama, peneliti mengidentifikasi dan mengumpulkan dokumen resmi pemerintah Amerika Serikat, seperti *Executive Order*, dokumen kebijakan dari Departemen Perdagangan, serta laporan dari lembaga seperti *Committee on Foreign Investment in the United States* (CFIUS). Dokumen-dokumen ini digunakan untuk memahami secara langsung bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah serta latar belakang pembentukannya. Kedua, peneliti mengumpulkan pernyataan resmi dari pihak TikTok dan ByteDance, termasuk siaran pers, laporan transparansi, dan dokumen perusahaan. Data tersebut digunakan untuk melihat bagaimana perusahaan merespons kebijakan pemerintah Amerika Serikat serta strategi yang dilakukan untuk mempertahankan operasionalnya. Ketiga, peneliti menelaah literatur akademik, seperti jurnal dan buku yang relevan dengan topik penelitian, literatur ini berfungsi sebagai landasan teoritis dalam menganalisis fenomena yang diteliti. Keempat, peneliti juga mengumpulkan data dari media internasional yang kredibel, seperti Reuters, The New York Times, BBC News, Al Jazeera, Bloomberg, The Washington Post dan media lainnya. Sumber media ini digunakan untuk memperoleh informasi aktual mengenai perkembangan kebijakan, dinamika politik, serta respon publik terhadap isu TikTok di Amerika Serikat.

Setelah seluruh data terkumpul, peneliti melakukan proses seleksi dan klasifikasi data, yaitu memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mendukung analisis penelitian secara sistematis dan komprehensif.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif berdasarkan model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Tahap pertama adalah kondensasi data. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pemilahan, penyederhanaan, dan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan. Data kemudian dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori utama, seperti periode pemerintahan Amerika Serikat (Donald Trump periode pertama, Joe Biden, dan Donald Trump periode kedua), proses sekuritisasi TikTok, tindakan pemerintah Amerika Serikat terhadap TikTok, serta berbagai respons yang diberikan oleh TikTok. Selain itu, data juga diklasifikasikan berdasarkan unsur-unsur dalam teori sekuritisasi, yaitu *securitizing actor*, *speech act*, *referent object*, *audience acceptance*, dan *extraordinary measures*. Proses ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola dan hubungan antardata yang relevan dengan penelitian.

Tahap kedua adalah penyajian data. Setelah data dikondensasi, peneliti menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Penyajian data dilakukan dengan menjelaskan perkembangan hubungan antara pemerintah Amerika Serikat dan TikTok selama periode penelitian, mulai dari munculnya kekhawatiran terhadap TikTok, proses sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, berbagai tindakan yang diambil pemerintah, hingga respons yang diberikan oleh TikTok.

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Temuan-temuan empiris kemudian dianalisis menggunakan teori sekuritisasi dan konsep keamanan nasional guna menjelaskan bagaimana TikTok dikonstruksikan sebagai isu keamanan nasional oleh pemerintah Amerika Serikat serta bagaimana konstruksi ancaman tersebut memengaruhi tindakan pemerintah Amerika Serikat dan respons TikTok.

Dengan melalui ketiga tahapan tersebut, analisis data dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hubungan antara pemerintah Amerika Serikat dan TikTok pada periode 2019–2026.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa dinamika hubungan antara Pemerintah Amerika Serikat dan TikTok pada periode 2019 – 2026 tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, tetapi juga oleh konstruksi ancaman yang dibangun pemerintah Amerika Serikat terhadap TikTok. Melalui proses sekuritisasi, TikTok yang pada awalnya dipandang sebagai platform media sosial dan hiburan berhasil direpresentasikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Ancaman tersebut dikaitkan dengan potensi akses pemerintah Tiongkok terhadap data pengguna Amerika Serikat, kemungkinan pengaruh terhadap opini publik, serta risiko terhadap kedaulatan digital Amerika Serikat.

Proses sekuritisasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat memenuhi elemen-elemen sekuritisasi yang dikemukakan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde. Pemerintah Amerika Serikat bertindak sebagai *securitizing actor* yang secara konsisten menyampaikan *speech act* mengenai ancaman TikTok melalui pernyataan pejabat pemerintah, sidang Kongres, dokumen kebijakan, serta berbagai tindakan politik lainnya. Dalam proses tersebut, keamanan data warga negara, kedaulatan digital, dan integritas ruang informasi Amerika Serikat ditempatkan sebagai *referent object* yang harus dilindungi. Narasi ancaman yang dibangun pemerintah kemudian memperoleh penerimaan dari berbagai institusi politik dan sebagian masyarakat Amerika Serikat sehingga memungkinkan dilaksanakannya berbagai *extraordinary measures* berupa investigasi, pembatasan operasional, tuntutan divestasi, hingga pengesahan regulasi yang secara khusus ditujukan kepada TikTok.

Dari perspektif keamanan nasional, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Amerika Serikat terhadap TikTok tidak hanya didasarkan pada pertimbangan keamanan data semata, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan kedaulatan negara dan kepentingan nasional dalam era digital. Dalam elemen kedaulatan, pemerintah Amerika Serikat berupaya memastikan bahwa data warga negaranya tidak berada di bawah potensi pengaruh negara asing. Dalam elemen kepentingan nasional, pemerintah berusaha mempertahankan kontrol terhadap ruang informasi domestik yang memiliki pengaruh besar terhadap opini publik dan stabilitas politik. Dalam elemen ancaman, TikTok dipersepsikan sebagai ancaman non-tradisional yang berasal dari perkembangan teknologi digital dan persaingan geopolitik dengan Tiongkok. Sementara itu, dalam elemen lingkungan keamanan, kebijakan terhadap TikTok dipengaruhi oleh meningkatnya kompetisi strategis Amerika Serikat dan Tiongkok di bidang teknologi, data, dan kecerdasan buatan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hubungan antara Pemerintah Amerika Serikat dan TikTok mengalami perubahan pola pada setiap periode pemerintahan. Pada masa pemerintahan Donald Trump periode pertama (2019–2021), hubungan kedua pihak didominasi oleh pola konfrontatif yang ditandai dengan ancaman pelarangan dan tuntutan divestasi. Pada masa pemerintahan Joe Biden (2021–2025), pendekatan yang digunakan lebih menekankan proses negosiasi dan evaluasi keamanan melalui mekanisme Project Texas serta penguatan pengawasan terhadap pengelolaan data pengguna Amerika Serikat. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Donald Trump periode kedua (2025–2026), hubungan kedua pihak berkembang ke arah yang lebih solutif melalui restrukturisasi kepemilikan dan pembentukan TikTok USDS Joint Venture LLC sebagai upaya kompromi antara tuntutan keamanan nasional Amerika Serikat dan kepentingan bisnis TikTok untuk tetap beroperasi di pasar Amerika Serikat.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan Pemerintah Amerika Serikat terhadap TikTok merupakan hasil dari keberhasilan proses sekuritisasi yang mengonstruksikan TikTok sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Sekuritisasi tersebut kemudian menjadi dasar legitimasi bagi berbagai kebijakan yang diambil pemerintah Amerika Serikat selama periode 2019–2026. Kasus TikTok menunjukkan bahwa dalam era digital, isu teknologi, data, dan

platform media sosial dapat berkembang menjadi isu keamanan nasional yang mendorong negara mengambil tindakan luar biasa untuk melindungi kedaulatan, kepentingan nasional, dan keamanan informasi yang dianggap vital bagi keberlangsungan negara.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan, baik secara akademis maupun praktis:

### **1. Bagi Pemerintah Amerika Serikat**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar pemerintah Amerika Serikat terus memperkuat kajian dan evaluasi terhadap risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh platform digital yang terafiliasi dengan negara pesaing strategis. Peneliti menilai bahwa penanganan kasus TikTok selama 2019–2026 menunjukkan masih adanya celah dalam hal standar penilaian ancaman yang objektif dan berbasis bukti, sehingga diperlukan lebih banyak riset dari lembaga pemerintah, akademik, maupun melalui kolaborasi internasional mengenai mekanisme pengawasan platform digital asing yang efektif.

### **2. Bagi Akademisi dan Peneliti**

Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperdalam analisis mengenai efektivitas mekanisme restrukturisasi kepemilikan platform digital asing sebagai solusi atas konflik keamanan nasional, khususnya dengan menelusuri sejauh mana pembentukan TikTok USDS Joint Venture LLC benar-benar memutus akses ByteDance terhadap data pengguna Amerika Serikat. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat mengkaji dampak kebijakan terhadap ekosistem pengguna dan pelaku ekonomi digital yang bergantung pada TikTok, seperti kreator konten, pelaku usaha kecil, dan industri periklanan digital. Pendekatan studi kasus yang lebih mendalam akan membantu menunjukkan bagaimana kebijakan

keamanan nasional yang bersifat makro dapat menghasilkan dampak yang tidak proporsional pada kelompok-kelompok tertentu di tingkat mikro.

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji faktor ekonomi politik dan persaingan teknologi dalam kebijakan Amerika Serikat terhadap TikTok. Salah satu aspek yang menarik untuk diteliti adalah kemungkinan bahwa tindakan Amerika Serikat terhadap TikTok tidak hanya didorong oleh pertimbangan keamanan nasional, tetapi juga berkaitan dengan prinsip resiprositas dalam hubungan Amerika Serikat–Tiongkok. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis apakah pembatasan terhadap TikTok merupakan respons terhadap kebijakan Tiongkok yang selama ini membatasi atau tidak mengizinkan berbagai platform digital Amerika Serikat, seperti Google, Facebook, Instagram, X, dan YouTube, beroperasi secara bebas di pasar domestiknya. Kajian tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan perspektif ekonomi politik internasional, geopolitik teknologi, maupun techno-nationalism untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika persaingan digital antara kedua negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- 10 Negara dengan Pengguna TikTok Terbesar, Indonesia Urutan Berapa? - GoodStats Data.* (2020). <https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-dengan-pengguna-tiktok-terbesar-indonesia-urutan-berapa-xFOgI>
- American Journal of International Law. (2020). *United States pursues regulatory actions against TikTok and WeChat over data security concerns.*
- Anderson, J. E., Moyer, J., & Chichirau, G. (2023). *Public policymaking: An introduction* (9th ed.). Cengage Learning.
- Angela, S. (2024). *Analisis Hukum Internasional atas Kasus TikTok Terkait Keamanan Digital dan Persaingan Global AS-China.* Indonesian Journal of Law.
- Associated Press. (2024). *TikTok sues U.S. to block law that could ban the social media platform.* <https://apnews.com>
- Baldwin, D. A. (1997). *The concept of security.* Review of International Studies, 23(1), 5–26. <https://doi.org/10.1017/S0260210597000053>
- Barman, S. (2024). *Digital Diplomacy: The Influence Of Digital Platforms On Global Diplomacy And Foreign Policy.* Vidya - A Journal Of Gujarat University. <https://doi.org/10.47413/vidya.v3i1.304>.
- BBC News. (2025). *What's happening with TikTok in the US?* BBC News.
- Bjola, C., & Holmes, M. (2020). *Digital diplomacy and international organisations: Autonomy, legitimacy and contestation.* Routledge.

- Blogs, M. C. (2020). Microsoft statement on TikTok. The Official Microsoft Blog. <https://blogs.microsoft.com/blog/2020/09/13/microsoft-statement-on-tiktok/>
- Bloomberg Technoz. (2025). *Trump-Xi Jinping deal TikTok di AS akan dilepas ke investor AS.* Bloomberg Technoz. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/84626/trump-xi-jinping-deal-tiktok-di-as-akan-dilepas-ke-investor-as>
- Britannica Editors. (2025). *TikTok App, History, Videos, Ban, China, & Controversies.* Encyclopædia Britannica.
- Brookings Institution. (2022). *The TikTok challenge: National security, data, and U.S.-China tech competition.*
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis.* Lynne Rienner Publishers.
- Carnegie Endowment for International Peace. (2023). *TikTok, data governance, and national security concerns.*
- Castmagic. (2025). *TikTok users by country statistics.* <https://www.castmagic.io>
- Center for Strategic and International Studies. (2023). *Technology competition and platform regulation.*
- Center for Strategic and International Studies. (2024). *TikTok and national security.* <https://www.csis.org/analysis/tiktok-and-national-security>
- CFIUS Review Culminates in Order Directing ByteDance, Ltd. To Divest TikTok.* (2020). Crowell & Moring - CFIUS Review Culminates in Order Directing ByteDance, Ltd. to Divest TikTok.
- Citizen Lab. (2021). *TikTok vs Douyin: A security and privacy analysis.* University of Toronto. <https://citizenlab.ca/2021/03/tiktok-vs-douyin-security-privacy-analysis/>
- CNBC. (2025). *TikTok U.S. sale deal faces China approval questions.* CNBC.

- Congressional Research Service. (2020). *TikTok: Technology overview and issues for Congress*. Congressional Research Service. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11606>
- Congressional Research Service. (2023). *TikTok: Technology overview and issues for Congress*. Congressional Research Service.
- Council on Foreign Relations. (2023). *The U.S. government banned TikTok from federal devices*.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fifth)*. SAGE Publications, Inc.
- Crowell & Moring LLP. (2020). *CFIUS review culminates in order directing ByteDance to divest TikTok*. <https://www.crowell.com/en/insights/client-alerts/cfius-review-culminates-in-order-directing-bytedance-ltd-to-divest-tiktok>
- Datareportal. (2020). *Digital 2020: United States of America*. We Are Social & Hootsuite.
- David Curry. (2026). *TikTok Revenue and Usage Statistics (2026)*. Business of Apps. <https://www.businessofapps.com/data/tik-tok-statistics/>
- Dermawan, R. (2020). The national interest concept in a globalised international system. *Indonesian Journal of International Relations*, 4(1), 1-10.
- Devara, A. F. N., Subagyo, A., & Akbar, T. H. (2025.). *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Afghanistan Di Bawah Kepemimpinan Donald Trump 2017-202*.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson
- European Council on Foreign Relations. (2024). *Digital sovereignty and global tech regulation*.

- Federal Register. (2020). *Executive Order 13942 of August 6, 2020: Addressing the threat posed by TikTok*.  
<https://www.federalregister.gov/documents/2020/08/11/2020-17699/addressing-the-threat-posed-by-tiktok-and-taking-additional-steps-to-address-the-national>
- Huda, M., & Al-Fadhat, F. (2022). *The political economy of the US-China cybersecurity relations and trade war under the Trump administration*
- Indrayani, I., & Maharani, T. (2022). The United State's National Security Protection From Cyber Crime Threats A Case Study Of Tik Tok Banning Submission By The President Donald Trump In 2020. *Journal of Social Political Sciences*, 3(3), 268-280. <https://doi.org/10.52166/jsps.v3i3.122>
- Jones, C. O. (1970). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Belmont: Wadsworth.
- Kartasmita, G. (2020). The Securitization of China's Technology Companies in the United States of America. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(2), 159-178. <https://doi.org/10.26593/jihi.v16i2.4204.159-178>
- Kaye, D. (2019). *A human rights approach to platform content regulation*. United Nations Human Rights Council Report.
- Kemp, S. (2025). *Essential TikTok statistics and trends*. DataReportal. <https://datareportal.com/essential-tiktok-stats>
- Kerr, D. (2023). Lawmakers grilled TikTok CEO Chew for 5 hours in a high-stakes hearing about the app. NPR. <https://www.npr.org/2023/03/23/1165579717/tiktok-congress-hearing-shou-zi-chew-project-texas>
- Kerry, C., & Cooper, L. (2020). *Ensuring U.S. data security: TikTok and beyond*. Brookings Institution. <https://www.brookings.edu/articles/ensuring-u-s-data-security-tiktok-and-beyond/>

- Lin, P. (2021). *TikTok vs Douyin: A Security and Privacy Analysis* (Citizen Lab Research Report No. 137). University of Toronto. <https://citizenlab.ca/2021/03/tiktok-vs-douyin-security-privacy-analysis/>
- Liu, H. (2021). U.S.-China technological rivalry and the politics of data security. *Journal of Cyber Policy*, 6(2), 220-239.
- Lippmann, W. (1943). *U.S. foreign policy: Shield of the republic*. Little, Brown and Company
- Manor, I. (2019). *The digitalization of public diplomacy*. Palgrave Macmillan.
- Mazmanian, D., & Sabatier, P. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview: Scott, Foresman.
- National Public Radio. (2023). *Lawmakers turn up the heat on TikTok's CEO Shou Zi Chew in high-stakes hearing*. <https://www.npr.org/2023/03/23/1165579717/tiktok-congress-hearing-shou-zi-chew-project-texas>
- New York Times. (2020). *Judge temporarily halts Trump's TikTok ban*. <https://www.nytimes.com/2020/09/27/technology/tiktok-ban-blocked.html>
- Newman, J. (2025). China has law requiring businesses and persons overseas to get secrets from host countries and their businesses for China's government. *Jeff Newman Law*. <https://jeffnewmanlaw.com/china-has-law-requires-businesses-and-persons-oversees-to-get-secrets-from-host-countries-and-their-businesses-for-cginas-government/>
- NOLO. 2024. *Due Process of Law*. Nolo Legal Dictionary. <https://dictionary.nolo.com/due-process-of-law-term.html>.
- Oxford Economics. (2024). *TikTok economic impact report 2024*. Commissioned by TikTok Inc. <https://tiktokeconomicimpact.com/>
- Permana, A., & Aurellie, A. (2025). *Digital Anarchy and Security Dilemmas: Unraveling the TikTok Controversy in the Landscape of Cyber Realism and*

*Hegemony Struggles between the United States and China*. ARISTO, 13(2), 361-385. <https://doi.org/10.24269/ars.v13i2.10373>

Peterson Institute for International Economics. (2023). *Economic implications of restricting foreign tech firms*.

Pew Research Center. (2020). *Unfavorable views of China reach historic highs in many countries*.  
<https://www.pewresearch.org/global/2020/10/06/unfavorable-views-of-china-reach-historic-highs-in-many-countries/>

Pew Research Center. (2025). *Americans' social media use 2025*. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/internet/2025/11/20/americans-social-media-use-2025/>

Pew Research Center. (2025). *TikTok is increasingly a place for news, especially among young U.S. adults*. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/internet/2025/11/20/americans-social-media-use-2025/>

Project Texas: Inside TikTok's billion-dollar plan to stay in America. (n.d.). Texas Standard. <https://www.texasstandard.org/stories/project-texas-tiktok-plan-stay-america-oracle-security>

Ray, S. (2020). *40persen of Americans support Trump's threat to ban TikTok, survey finds*. Forbes.

Reuters. (2019). *U.S. opens national security investigation into TikTok owner ByteDance's acquisition of Musical.ly*.  
<https://www.reuters.com/article/technology/tiktoks-musically-deal-needs-us-national-security-review-senator-idUSKBN1WO283>

Reuters. (2020). *Oracle emerges as potential partner for TikTok in U.S.*

Reuters. (2025). *Developments in TikTok U.S. legal and ownership dispute*.  
Reuters.

- Reuters. (2025). *TikTok's journey from global sensation to Trump target*.  
<https://www.reuters.com/legal/litigation/tiktoks-journey-global-sensation-trump-target-2025-09-16>
- Reuters. (2025). *Trump says there is great interest in TikTok*.  
<https://www.reuters.com/technology/trump-says-there-is-great-interest-tiktok-2025-02-04>
- Reuters. (2026). *Lawsuit over TikTok joint venture deal*.
- Reuters. (2026). *TikTok reaches deal for U.S. joint venture*.  
<https://www.reuters.com/>
- Reuters. (2026). *TikTok seals deal for new U.S. joint venture to avoid American ban*. Reuters.
- Reuters. (2026). *Trump administration TikTok deal fee*.  
<https://www.reuters.com/>
- Rolling Stone. (2024). *If TikTok goes, so do these people's livelihoods*.  
<https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/tiktok-ban-economic-impact-creators-small-business-1235213942/>
- Scripps News. (2026). *US and China sign off on TikTok divestment deal, clearing path for American spinoff*. Scripps News.
- Segal, A. (2020). *The coming tech cold war with China*. Council on Foreign Relations.
- Stopford, J. M., Strange, S., & Henley, J. S. (1991). *Rival states, rival firms: Competition for world market shares*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Strange, S. (1996). *The retreat of the state: The diffusion of power in the world economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sun, Y., Pinkse, J., & Bleda, M. (2025). *Social Media Platforms' Use of Nonmarket Strategy to Manage Politically Contentious Issues in Host Countries: The*

*Case of TikTok in the US Market.* Journal of International Management, Elsevier.

Supreme Court of the United States. (2025, January 17). *TikTok Inc. v. Garland*, No. 24-656. [https://www.supremecourt.gov/opinions/24pdf/24-656\\_ca7d.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/24pdf/24-656_ca7d.pdf)

TechCrunch. (2025). *TikTok agrees to deal to cede control of U.S. business to American investor group.* TechCrunch.

Texas Public Policy Foundation. (2023). *Project Texas: Evaluating TikTok's data security proposal.*

Texas Standard. (2023). *Project Texas: Inside TikTok's billion-dollar plan to stay in America.* <https://www.texasstandard.org/stories/project-texas-tiktok-plan-stay-america-oracle-security/>

The American Presidency Project. (2021). *Executive Order 14034—Protecting Americans' Sensitive Data from Foreign Adversaries.* University of California, Santa Barbara. <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-14034-protecting-americans-sensitive-data-from-foreign-adversaries>

The First Amendment Encyclopedia. (2025). *TikTok v. Garland (2025).* Middle Tennessee State University. <https://firstamendment.mtsu.edu/article/tiktok-v-garland>

The Guardian. (2020). *Trump bans U.S. transactions with Chinese-owned TikTok and WeChat.* <https://www.theguardian.com/technology/2020/aug/06/trump-tiktok-wechat-ban>

The New York Times. (2020). *Judge halts TikTok ban.* <https://www.nytimes.com/2020/09/27/technology/tiktok-ban-us-judge>

The New York Times. (2025). *How a sale of TikTok would work and who might buy it.* The New York Times.

- The New York Times. (2025). *Trump signs executive order in attempt to stall TikTok ban*. The New York Times
- The Wall Street Journal. (2025–2026). *TikTok joint venture negotiations*.
- The Washington Post. (2026). *TikTok U.S. spinoff finalized*
- The White House. (2017). *National security strategy of the United States of America*. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>
- TikTok Newsroom. (2020). *How TikTok recommends videos for you*.
- TikTok Newsroom. (2024). *TikTok enhances U.S. data security with independent security inspectors*. <https://newsroom.tiktok.com/tiktok-data-security-usds-independent-security-inspectors-june-2024?lang=en>
- TikTok Newsroom. (2026). *Announcement from the new TikTok USDS Joint Venture LLC*. TikTok Inc.
- Translate, C. L. (2017). PRC National Intelligence Law. China Law Translate. <https://www.chinalawtranslate.com/national-intelligence-law-of-the-p-r-c-2017/>
- Triolo, P., Allison, K., & Lewis, J. (2020). *The global race for 5G and the implications for U.S.-China tech competition*. Eurasia Group.
- U.S. Congress. (2024). *H.R. 7521 - Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act*. 118th Congress. Congress.gov. <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/7521>
- U.S. Department of State. (2020). *Secretary Michael R. Pompeo remarks on TikTok*. <https://www.state.gov>
- U.S. District Court. (2020). *TikTok Inc. v. Trump*. <https://www.courtlistener.com/docket/18631525/tiktok-inc-v-trump/>
- U.S. House Committee on Energy and Commerce. (2023). *Testimony Before the U.S. House Committee on Energy and Commerce by Shou Zi Chew, CEO of*

*TikTok.*

<https://docs.house.gov/meetings/IF/IF00/20230323/115519/HHRG-118-IF00-Wstate-ChewS-20230323.pdf>

U.S. Treasury. (2019). *CFIUS to review ByteDance acquisition of Musical.ly.*  
<https://home.treasury.gov/news/press-releases>

U.S. Treasury. (2020). *Order of the President regarding ByteDance and TikTok August 14, 2020.*

U.S. Treasury. (2020). *Order regarding ByteDance Ltd. and TikTok.*

United States Senate. (2019). *Letter to Secretary Steven Mnuchin regarding TikTok and CFIUS review.*

Wahidin, I. A., & Yuniarti. (2023). Upaya Amerika Serikat mengakuisisi TikTok tahun 2020. *Jurnal Sosial-Politika*, 4(1)

Witarti, D. I. (2011). Tinjauan teoritis mengenai konsep keamanan nasional. *Transnasional: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(1), 1–13.

White House. (2020). *Executive Order 13942: Addressing the threat posed by TikTok.*  
<https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-addressing-threat-posed-tiktok/>

White, J. (2015). *Strategic corporate diplomacy: Building reputations and relationships with external stakeholders.* London: Palgrave Macmillan.

Wolfers, A. (1952). "National security" as an ambiguous symbol. *Political Science Quarterly*

Wood, C. (2020). *TikTok's first transparency report says China made 0 censorship or information requests in the first half of 2019, while the US made 79.* Business Insider.

Zeng, J., & Kaye, D. From content moderation to visibility moderation : A case study of platform governance on TikTok. *Policy & Internet*. 2022  
<https://doi.org/10.1002/poi3.287>.